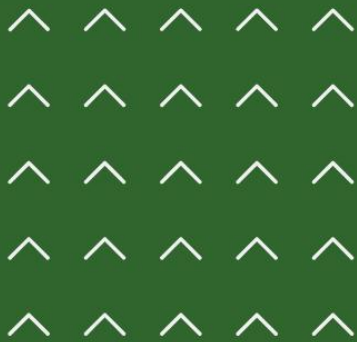




PEMERINTAH  
KABUPATEN  
LAMONGAN.



# LAPORAN BERKALA PENGELOLAAN RISIKO

**TRIBULAN 4**

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
KABUPATEN LAMONGAN

**2024**

JL. MASTRIP NO.61 LAMONGAN -62216



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA**

Jl. Mastrip No. 61 Lamongan – Kode Pos 62216  
Telp. (0322) 321170 E – mail : [pubmrg@lamongankab.go.id](mailto:pubmrg@lamongankab.go.id)  
Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	600.1.18/22.A/413.103/2025.
TANGGAL TERBIT	:	10 Januari 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan  VIVI FEBRIANTI, S.STP.,MM 19950218 201708 2 002 Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan  SEFRIANA MIRA HASLINDA, ST.,MT 19750920 200312 2 006 Sekretaris Dinas PU Bina Marga
Disahkan Oleh	:	Plt. KEPALA DINAS PU BINA MARGA KAB. LAMONGAN  ERWIN SULISTYA PAMBUDI, ST.,M.M 19770327 200312 1 006 Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko merupakan suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui maupun belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;

- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

### **A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I**

DINAS PU Bina Marga Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV tahun 2024 sebagaimana terlampir. (lampiran 1)

### **B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I**

DINAS PU Bina Marga Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 tahun 2024, yang telah dilaksanakan adalah:, dan yang belum dilaksanakan adalah (lampiran 2)

## **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Kendala terhambatnya kegiatan pengendalian Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan yang menyebabkan penyajian data perencanaan tidak tepat waktu adalah kondisi fasilitas kantor yang belum memadai dan belum terkumpulnya data yang dibutuhkan, serta banyaknya permintaan data secara bersamaan.
- b. Hambatan yang menyebabkan terlambatnya pengerjaan konstruksi adalah kurangnya kemampuan finansial plant dari pemenang lelang dan keterbatasan kesiapan batching plant, AMP dari penyedia bahan material.

## **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

## **V. PENUTUP**



Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan 4 dapat disimpulkan bahwa bahwa potensi - potensi risiko yang terjadi di Dinas Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian risiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya risiko. Sehingga diharapkan pengendalian risiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi risiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian risiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian risiko.

**LAMPIRAN 1**  
**( Form 9 APLIKASI Simario )**

**A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV**

Formulir Kertas Kerja

Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda     Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama OPD       Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Tahun

Penilaian       2024

Periode yang

Dinilai          2024

Tujuan

Strategis        Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko

Urusan

Pemerintahan   PU dan Tata Ruang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD						
1	Menyusun Perencanaan dengan mempertimbangkan perolehan anggaran dan paket pekerjaan jalan dan jembatan yang sesuai sasaran	1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2. Melakukan Forum Perangkat Daerah 3. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal, sidsa resiko
2	Evaluasi terhadap paket pekerjaan yang telah berjalan	1. Pelaksanaan Monitoring terhadap pelaksanaan paket pekerjaan 2. Laporan hasil fisik paket pekerjaan jalan dan jembatan	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal, sidsa resiko
3	Melakukan survei kondisi jalan dan jembatan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kondisi jalan dan jembatan	Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal, sidsa resiko

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
4	Melakukan monitoring secara berkala terhadap jalan yang telah dipelihara	1. Pelaksanaan monitoring terhadap jalan dan jembatan yang dipelihara 2. Laporan fisik jalan dan jembatan yang dipelihara	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal, sisdas resiko
5	Melakukan evaluasi kinerja yang dilakukan kepada seluruh pegawai secara berjenjang	1. Perjanjian kinerja seluruh pegawai 2. Laporan capaian kinerja pegawai	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal, sisdas resiko
Risiko Operasional OPD						
1	Penyusunan anggaran kas sesuai dengan pelaksanaan kegiatan	1. Reviu rencana kerja anggaran perangkat daerah 2. Dokumen pelaksanaan anggaran	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan	Tribulan I s/d Tribulan IV Tahun 2024	Tribulan I s/d Tribulan IV Tahun 2024	Sesuai jadwal, sisdas resiko
2	Evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan pekerjaan bidang dinas	Laporan evaluasi kinerja masing masing bidang lingkungan pekerjaan dinas PU Bina Marga	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan	Tribulan I s/d Tribulan IV Tahun 2025	Tribulan I s/d Tribulan IV Tahun 2025	Sesuai jadwal, sisdas resiko
3	Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala	Laporan evaluasi kinerja pegawai	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan	Tribulan I s/d Tribulan IV Tahun 2026	Tribulan I s/d Tribulan IV Tahun 2026	Sesuai jadwal, sisdas resiko
4	memberikan reward maupun punishment kepada pegawai	Laporan Daftar hadir pegawai	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan	Tribulan I s/d Tribulan IV Tahun 2027	Tribulan I s/d Tribulan IV Tahun 2027	Sesuai jadwal, sisdas resiko
5	Evaluasi sarana dan prasarana kantor secara berkala	Monitoring laporan inventaris sarana dan prasarana kantor	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan	Tribulan I s/d Tribulan IV Tahun 2028	Tribulan I s/d Tribulan IV Tahun 2028	Sesuai jadwal, sisdas resiko
6	Evaluasi penggunaan alat berat secara berkala	Laporan evaluasi alat berat	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan	Tribulan I s/d Tribulan IV Tahun 2029	Tribulan I s/d Tribulan IV Tahun 2029	Sesuai jadwal, sisdas resiko





**LAMPIRAN 2**  
**( Form 10. APLIKASI Simario )**

**B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV**

**Formulir Kertas Kerja**  
**Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) dan RTP**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan  
Tahun Penilaian : 2024  
Tujuan Strategis Pemda  
Urusan Pemerintahan : PU dan Tata Ruang  
Dinas Terkait : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket .	RTP	Rencana Pelaksana an RTP	Realisasi Pelaksanaa n RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD										
1	Kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik belum optimal	RSO.24.0 3.04.19	Januari s/d Desember	Keterbatasan anggaran	Indeks infrastruktur jalan dan jembatan tidak tercapai	-	Menyusun perencanaan dengan mempertimbangkan perolehan anggaran dan paket pekerjaan jalan dan jembatan yang sesuai sasaran	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan I , II, dan III	- Sesuai jadwal - Reviu RKA Pergeseran Reviu RKA PAK

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket .	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
2	Kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik belum optimal	RSO.24.0 3.04.19	Januari s/d Desember	Keterbatasan anggaran	Indeks infrastruktur jalan dan jembatan tidak tercapai	-	Evaluasi terhadap paket pekerjaan yang telah berjalan	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan I , II, dan III	- Sesuai jadwal - Laporan fisik tribulan 1,2,3
3	Kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik belum optimal	RSO.24.0 3.04.19	Januari s/d Desember	Keterbatasan anggaran	Indeks infrastruktur jalan dan jembatan tidak tercapai		Melakukan survei kondisi jalan dan jembatan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kondisi jalan dan jembatan	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan I , II, dan III	- Sesuai jadwal - laporan perencanaan survey kondisi jalan dan jembatan
4	Kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik belum optimal	RSO.24.0 3.04.19	Januari s/d Desember	Keterbatasan anggaran	Indeks infrastruktur jalan dan jembatan tidak tercapai		Melakukan monitoring secara berkala terhadap jalan yang telah dipelihara	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan I , II, dan III	- Sesuai jadwal Sesuai jadwal - laporan monitoring perencanaan jalan yang akan dipelihara
5	Implementasi SAKIP Internal belum optimal	RSO.24.0 3.04.19	Januari s/d Desember	Kurangnya pemahaman terkait implementasi SAKIP	Nilai SAKIP PU Bina Marga menurun		Melakukan evaluasi kinerja yang dilakukan kepada seluruh pegawai secara berjenjang	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan I , II, dan III	- Sesuai jadwal - Laporan capaian kinerja

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket .	RTP	Rencana Pelaksana an RTP	Realisasi Pelaksanaa n RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Operasional OPD										
1	Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.24.03.04.19	Januari s/d Desember	kurangnya koordinasi dalam penyusunan anggaran kas	Penyerapan anggaran yang tidak tepat waktu		Penyusunan anggaran kas sesuai dengan pelaksanaan kegiatan	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan I , II, dan III	- Sesuai jadwal - Reviu RKA, Pergeseran, rivi RKA PAK
2	Layanan administrasi umum kurang maksimal	ROO.24.03.04.19	Januari s/d Desember	Keterbatasan anggaran	Pelaksanaan masing masing bidang kurang maksimal		Evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan pekerjaan bidang dinas PU Bina Marga	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan I , II, dan III	-Sesuai jadwal -Laporan kegiatan
3	Kinerja pegawai belum optimal	ROO.24.03.04.19	Januari s/d Desember	kurangnya kedisiplinan dan kesadaran pegawai	pelayanan administrasi kurang maksimal		Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan I , II, dan III	-Sesuai jadwal -Laporan kegiatan
4	Kinerja pegawai belum optimal	ROO.24.03.04.19	Januari s/d Desember	kurangnya kedisiplinan dan kesadaran pegawai	pelayanan administrasi kurang maksimal		Memberikan reward maupun punishment kepada pegawai	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan I , II, dan III	-Sesuai jadwal -Laporan kegiatan
5	Sarana dan prasarana kurang terpelihara	ROO.24.03.04.19	Januari s/d Desember	kurangnya kesadaran untuk memelihara sarana dan prasarana kantor	pelaksanaan kegiatan kurang maksimal		Evaluasi Sarana dan prasarana kantor secara berkala	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan I , II, dan III	- Sesuai jadwal - Laporan inventaris sarana dan prasarana

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket .	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
6	Pemanfaatan alat berat kurang maksimal	ROO.24.03.04.19	Januari s/d Desember	Banyak alat berat yang sudah rusak	PAD Dinas PU Bina Marga tidak tercapai		Evaluasi penggunaan alat berat secara berkala	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan I , II, dan III	- Sesuai jadwal - Laporan pemanfaatan alat berat